

Sekolah Menengah Kejuruan dan Masalahnya

BABARI*

Pemerintah dalam Pelita IV telah berikhtiar untuk lebih memperhatikan usaha peningkatan *daya tampung* dan *mutu pendidikan* di sekolah-sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan lulusan/tamatan sekolah menengah kejuruan dengan tuntutan/persyaratan dari lapangan kerja yang ada serta dengan tingkat pertumbuhan industri, baik industri konstruksi, pengolahan, manufaktur ataupun jasa perdagangan dan kegiatan usaha lainnya. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan sekolah menengah kejuruan, yaitu membina atau mempersiapkan anak didik untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk bekerja. Oleh karena itu kurikulum sekolah menengah kejuruan seharusnya berorientasi pada lapangan kerja.

Perhatian dan tekad pemerintah untuk mengembangkan sekolah menengah kejuruan ini terlihat dalam buku Pelita IV (Jilid II, Bab XX) tentang Pendidikan. Di sekolah menengah tingkat pertama kejuruan dan teknologi pengembangan dalam arti rehabilitasi gedung sekolah, penambahan ruang kelas dan ruang/tempat praktek bersama dengan peralatan yang diperlukan akan meliputi 49 Sekolah Teknik Negeri, 15 Sekolah Kesejahteraan Keluarga tingkat Pertama Negeri dan 11 SMTP Kejuruan dan Teknologi swasta. Di samping itu juga disediakan penambahan jumlah buku-buku pelajaran pokok dan buku-buku untuk perpustakaan dan diadakan penataran bagi guru-gurunya. Di Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan dan Teknologi, pengembangan dan peningkatan daya tampung akan meliputi 145 Sekolah Teknik Menengah, 23 Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, 277 Sekolah Menengah Ekonomi Atas, 88 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga dan Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan, 10 Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial dan 17 Sekolah Kesenian dan Teknologi lainnya. Selain itu, akan

*Staf CSIS.

dibangun sejumlah SMTA Kejuruan dan Teknologi, di antaranya 30 Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, 40 Sekolah Menengah Ekonomi Atas, 40 Sekolah Teknik Menengah (termasuk sebuah STM Penerbangan dan beberapa STM Perkapalan dan STM Grafika), 10 Sekolah Kesenian dan Industri Kerajinan dan beberapa ratus Sekolah Pendidikan Guru termasuk Guru Pendidikan Olahraga.

Semua perencanaan itu menunjukkan bahwa pemerintah berikhtiar untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan guna memasuki lapangan kerja, melalui jalur pendidikan sekolah kejuruan dan teknologi. Namun untuk mewujudkannya kita masih menghadapi masalah kebijakan dasar tentang sekolah menengah kejuruan dan teknologi, kurikulum, guru, minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan dan teknologi, serta kaitannya dengan lapangan kerja. Masalah biaya bagi sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini perlu juga dipikirkan sedini mungkin, karena biaya penyelenggaraan sekolah kejuruan dan teknologi lebih besar daripada biaya penyelenggaraan sekolah menengah umum.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TERHADAP SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Di negara kita terdapat dua jalur pendidikan formal di tingkat sekolah menengah pertama atau atas, yaitu jalur sekolah menengah umum (SMP, SMA) dan jalur sekolah menengah kejuruan dan teknologi (ST, STM, SMEP, SMEA, SPG, SGO, SMKK dan seterusnya). Kedua jalur pendidikan formal ini tentu mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang dinyatakan berlaku di seluruh wilayah tanah air Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 dalam penjelasannya menegaskan bahwa, sekolah menengah umum mementingkan pelajaran-pelajaran teori dan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat perguruan tinggi. Sedangkan sekolah menengah kejuruan (vak) mendidik tenaga-tenaga untuk bermacam-macam pekerjaan keahlian dan keterampilan, sehingga kemungkinan untuk melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi bagi para siswanya tertutup sama sekali.

Akibatnya, seperti dikatakan dalam penjelasan undang-undang ini, sebagian terbesar anak lulusan SD memilih masuk sekolah menengah umum dengan harapan dapat meneruskan pelajarannya ke perguruan tinggi. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah menengah kejuruan sangat kurang, sehingga masyarakat mengalami kekurangan tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu, ditegaskan kembali bahwa baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah kejuruan bertujuan mendidik tenaga-

tenaga ahli yang dapat menunaikan kewajibannya terhadap negara, dan dari kedua jalur pendidikan formal tingkat menengah ini dapat dipilih siswa-siswa yang lulus terbaik untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi. Ketidaktegasan dalam menetapkan tujuan dari kedua jalur pendidikan formal tingkat sekolah menengah ini masih terasa hingga kini.

Hal ini terlihat dalam kebijaksanaan pemerintah dalam membina dan menata kehidupan sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Pada tahun 1960-an pemerintah menyatakan maksudnya untuk menambah jumlah sekolah kejuruan dan teknologi. Dan pada waktu itu jumlah sekolah kejuruan dan teknologi meningkat dengan cepat dan beberapa sekolah menengah umum diubah menjadi sekolah menengah kejuruan. Namun penambahan jumlah sekolah kejuruan dan teknologi ini tidak diikuti dengan perubahan dan pembaharuan kurikulumnya,¹ pengadaan tenaga guru sekolah kejuruan dan teknologi, serta persiapan sarana dan fasilitas sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Akibatnya sekolah-sekolah kejuruan dan teknologi menengah tersebut menghasilkan lulusan yang tidak berbeda dengan lulusan sekolah menengah umum setingkat.

Pada awal 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan rencana usaha penggabungan SMA, STM, SMEA, dan SKKA menjadi satu jenis sekolah komprehensif, yang disebut Sekolah Menengah Pembangunan. Sekolah Menengah Pembangunan ini bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan pekerja-pekerja pembangunan yang terlatih, tetapi juga untuk memberi efek transformasi ke arah masyarakat yang lebih rasional dan demokratis, melalui pengembangan dan penggunaan secara harmonis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dari sekolah menengah pembangunan ini sangat padat karena selain berisi pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan umum seperti terdapat dalam kurikulum SMA, juga memasukkan pelajaran keterampilan-keterampilan praktis seperti terdapat dalam kurikulum STM, SMEA, ataupun SKKA. Di tingkat sekolah menengah pertama, mulai tahun 1974 sekolah kejuruan dan teknologi diintegrasikan menjadi sekolah menengah umum (SMP). Dan sisanya akan dikembangkan menjadi sekolah keterampilan kejuruan, yang program pendidikannya diarahkan untuk memberikan keterampilan yang diperlukan di daerah pedesaan.

Selama ini sekolah menengah pembangunan tidak memperoleh pembinaan khusus, sehingga sekolah menengah pembangunan sudah disamakan dengan sekolah menengah umum biasa (SMA). Akibatnya lulusan dari semua sekolah itu mendapat perlakuan yang sama. Sementara itu kurikulum sekolah menengah kejuruan dan teknologi yang lain seperti STM, SMEA, SMKK, dan

¹C.E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1981), hal. 227-255.

SPG serta SGO, telah diperbaharui pada tahun 1976 untuk mempertahankan identitasnya. Namun kita masih menunggu sikap pemerintah yang tegas dan jelas mengenai eksistensi sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini. Apakah sekolah menengah kejuruan dan teknologi sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan formal tingkat menengah ini akan bertahan seperti saat ini ataukah akan diintegrasikan ke dalam sekolah menengah umum? Keragu-raguan seperti ini antara lain menyebabkan para orang tua memilih sekolah menengah umum sebagai tempat belajar anak-anaknya dan bukan sekolah menengah kejuruan dan teknologi.

KURIKULUM

Kurikulum adalah bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu institusi/sekolah yang harus dilaksanakan dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu sifat dan isi kurikulum harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari institusi/sekolah. Ini berarti bahwa sifat dan isi kurikulum sekolah menengah umum (SMP, SMA) harus berbeda dengan sifat dan isi dari sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah umum terutama bertugas untuk menyiapkan anak didik guna melanjutkan pelajarannya di perguruan tinggi, sedangkan sekolah menengah kejuruan menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai untuk kepentingan pembangunan. Tenaga kerja tersebut dibedakan atas: (1) tenaga kerja yang bekerja pada orang lain (pencari kerja); (2) tenaga kerja yang bekerja sendiri; dan (3) tenaga kerja yang memberi pekerjaan kepada orang lain (pencipta kerja).² Untuk menghasilkan jenis tenaga kerja yang diperlukan terlihat jelas dalam kurikulum dan silabus sekolah menengah kejuruan.

Dalam kurikulum pendidikan kejuruan dan teknologi tahun 1976, hirarki tujuan pendidikan kejuruan dijabarkan sebagai berikut: (1) tujuan umum pendidikan nasional; (2) tujuan institusional, yang harus dicapai seluruh program sekolah; (3) tujuan kurikuler yang harus dicapai oleh satu program bidang studi; dan (4) tujuan instruksional yang harus dicapai oleh suatu program pengajaran dari suatu bidang studi.³ Kemudian tujuan instruksional ini dijabarkan lagi dalam sejumlah pokok bahasan dan sub-pokok bahasan yang disesuaikan dengan waktu bilamana pokok bahasan itu akan dijabarkan oleh guru. Berdasarkan itu, guru di sekolah kejuruan harus mampu menjalankan dan mengkomunikasikan program pengajaran ini untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²A.S. Munandar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1981), hal. 10.

³Lihat buku *Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen P dan K Tahun 1976*.

Selain itu kurikulum sekolah menengah kejuruan tahun 1976/1977 dibagi bidang studi atas: (1) program umum; dan (2) program kejuruan, yang terdiri atas dasar kejuruan, teori kejuruan, dan praktek kejuruan. Pembobotan waktu dibagi atas 20% untuk program umum dan 80% untuk program kejuruan. Dan dalam program kejuruan, alokasi waktu dibagi lagi atas 50% untuk dasar dan teori kejuruan serta 50% untuk praktek kejuruan. Dengan pembobotan waktu seperti ini sebenarnya kurikulum sekolah menengah kejuruan tahun 1976/1977 ini dapat dinilai baik.

Masalahnya adalah apakah isi kurikulum ini sudah dilaksanakan secara baik dan tepat? Pertanyaan ini timbul mengingat kenyataan bahwa sekolah-sekolah menengah kejuruan sering mengalami kekurangan tenaga guru bidang studi dan ketiadaan sarana dan fasilitas yang menunjang pengajaran praktek. Lagipula masih ada keluhan bahwa silabus yang disusun oleh para guru di masing-masing sekolah sejenis dan setingkat belum seragam, karena tidak tersedianya tenaga guru, dan sarana serta fasilitas di sekolah-sekolah itu.

Kelemahan lain adalah proses mengajar guru di dalam kelas lebih menekankan bidang kognitif daripada bidang afektif. Anak didik lebih bersikap pasif dalam menerima dan mencerna pengetahuan. Guru belum mampu mendorong anak didik untuk aktif mengajukan pertanyaan, menganalisa, mengevaluasi dan mengajukan alternatif pemecahannya. Proses belajar-mengajar siswa aktif ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa mandiri sebagai salah satu modal bagi anak didik untuk memasuki lingkungan pekerjaan.

GURU BIDANG STUDI

Dewasa ini hampir semua jenis dan tingkat sekolah kejuruan dan teknologi mengalami kekurangan tenaga guru. Tenaga guru di sekolah-sekolah ini selain memiliki pengetahuan teoretis untuk bidang studinya juga harus memiliki keterampilan untuk menerapkan pengetahuan itu di bengkel-bengkel kerja atau di laboratorium. Ia juga harus mampu mendorong semangat anak didik untuk menyenangi bidang kejuruannya itu dan menanamkan rasa tanggung jawab serta disiplin bekerja. Dengan kata lain, ia bukan hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik, pembimbing, dan pemberi teladan dalam semangat dan disiplin.

Untuk mengatasi kekurangan guru ini, pemerintah dalam Pelita IV merencanakan untuk menambah sebanyak 42.900 guru SMTA Kejuruan dan Teknologi. Dan untuk meningkatkan mutu guru dalam bidang studinya, di-

rencanakan untuk menatar 16.000 guru dan kepala SMTA Kejuruan dan Teknologi termasuk 2.500 guru SMTA swasta. Sementara itu untuk SMTP Kejuruan dan Teknologi akan ditatar 2.800 guru.⁴

Selain sebagai pelaksana isi kurikulum sesuai dengan bidang studi yang dimilikinya, guru bertugas sebagai pengembang isi kurikulum. Pada permulaan tahun ajaran baru setiap guru merencanakan urutan pokok bahasan materi pelajaran untuk setiap semester ataupun sepanjang tahun ajaran itu. Agar dapat melaksanakan tugas ini secara baik, guru harus mengetahui secara tepat informasi tentang perkembangan bidang studinya, dalam arti perkembangan ilmunya maupun penerapannya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hal ini penting agar materi pelajaran yang diajarkan di sekolah selalu relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, para siswa benar-benar disiapkan untuk memasuki lapangan kerja.

Di samping itu lingkungan sekolah sebagai wadah proses belajar-mengajar perlu memiliki sarana dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas guru. Di setiap sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini perlu disediakan bengkel kerja, laboratorium, dan perpustakaan. Dengan demikian para guru dapat melaksanakan tugas secara baik. Sistem administrasi dan manajemen perlu juga ditata secara baik di setiap sekolah. Kekurangan guru di sekolah menengah kejuruan dan teknologi bukan hanya dalam arti jumlah tetapi juga dalam arti *mutu*. Sebaliknya beberapa jenis sekolah kejuruan dan teknologi seperti STM mengalami kelebihan tenaga guru, karena menerima guru yang tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan di sekolah itu akibat penempatan dari atas.

Menghadapi masalah tersebut perlu diambil langkah-langkah penanggulangannya secara simultan. Langkah-langkah tersebut bukan hanya berbentuk penataran guru bidang studi seperti yang dilaksanakan saat ini, tetapi juga penataan kembali sekolah-sekolah pendidikan guru, seperti SPG, SGO, IKIP, dan FKIP di universitas-universitas. Penataan ini tidak hanya berupa peninjauan kembali kurikulum sekolah pendidikan guru, tetapi penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan yang lengkap termasuk tenaga dosen yang bermutu di setiap sekolah pendidikan guru itu, sehingga dapat menghasilkan tenaga guru yang bermutu pula. Di samping itu pemerintah perlu meningkatkan minat terhadap profesi guru. Dewasa ini ada kesan bahwa seseorang terpaksa menjadi guru (termasuk tamatan dari sekolah guru), karena tidak diterima di tempat kerja lain di luar profesi guru ini.

⁴Lihat buku *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, 1984/1985 - 1988/1989*, Jilid II, hal. 549-560.

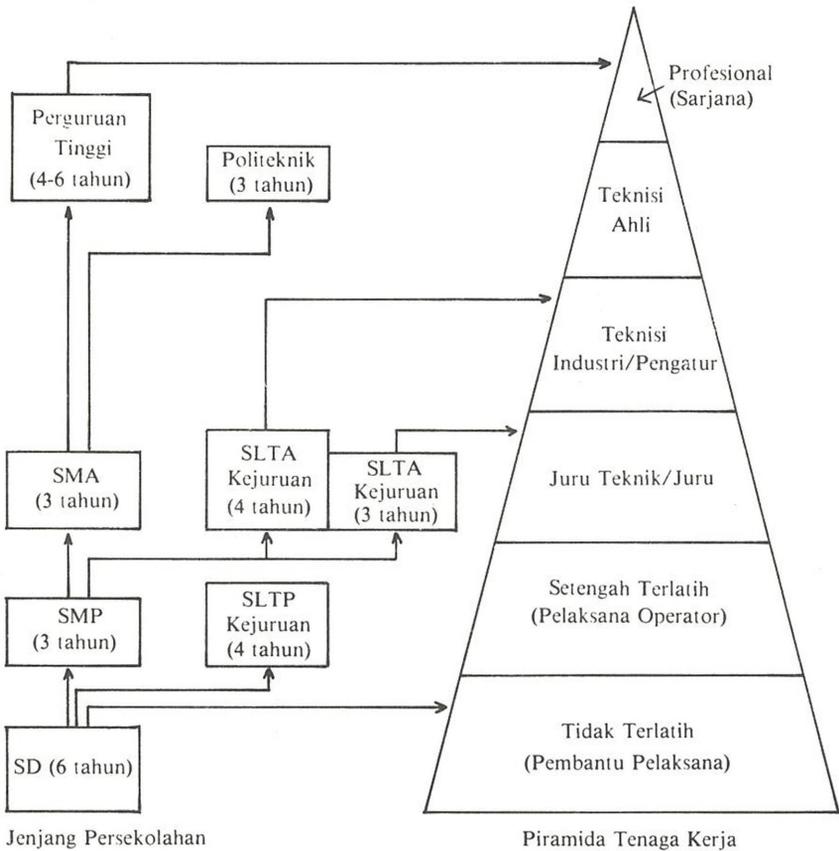
Untuk meningkatkan minat terhadap profesi guru tersebut, masalah peng-gajian guru perlu diberi perhatian khusus. Banyak guru sekolah kejuruan mengeluh bahwa tenaga dan waktu mereka terlalu banyak dipergunakan untuk kepentingan anak didik, dibandingkan dengan pegawai negeri lain. Padahal status dan pendapatan mereka sebagai sesama pegawai negeri adalah sama. Oleh karena itu banyak guru kurang bersemangat dalam melakukan tugas sebagai pengajar dan pendidik yang baik. Harus diakui bahwa tanggung jawab guru sebagai pembentuk generasi muda untuk masa depan bangsa sangat berat. Oleh karena itu sudah sepantasnya guru mendapat perhatian yang besar. Dewasa ini pemerintah berusaha membina administrasi kepen-didikan yang baik, seperti pemberian gaji guru tepat pada waktunya, kenaikan pangkat guru yang tepat waktu, dan bila perlu waktu kenaikan pangkat itu lebih cepat dari pegawai negeri yang lain. Usaha-usaha ini perlu diwujudkan dan bukan hanya berbentuk himbauan dan omongan belaka. Hal ini berkaitan erat dengan usaha untuk merangsang minat masyarakat memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah kejuruan.

MINAT MASYARAKAT

Secara umum minat masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah kejuruan dan teknologi tidak besar. Mungkin pihak orang tua ber-anggapan bahwa memasukkan anaknya ke sekolah menengah kejuruan dan teknologi sama dengan menyiapkan anaknya untuk menjadi tenaga kerja kasar. Sedangkan apabila anaknya dapat menempuh jalur pendidikan formal melalui sekolah menengah umum, peluang untuk menjadi tenaga kerja di kantor pemerintahan (white collar job) sangat besar. Di kalangan anak remaja sendiri, keinginan untuk masuk sekolah menengah umum juga lebih besar daripada ke sekolah menengah kejuruan. Melalui jalur sekolah menengah umum, mereka dapat melanjutkan pelajarannya ke perguruan tinggi, sedang-kan melalui sekolah menengah kejuruan kesempatan langsung untuk itu tidak ada. Sekolah menengah kejuruan dan teknologi menyiapkan anak didik untuk masuk ke lapangan kerja.

Usaha untuk menumbuhkan minat masyarakat memasukkan anak-anak-nya ke sekolah menengah kejuruan dan teknologi dapat dilakukan dengan: (1) meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan dan teknologi agar para lulusannya benar-benar siap pakai di lingkungan pekerjaan; (2) menyesuaikan jumlah keluaran sekolah menengah kejuruan dan teknologi dengan daya serap lapangan kerja yang ada; dan (3) mengatur sistem penggajian berdasarkan kreativitas dan prestasi kerja dan bukan hanya pada ijazah. Point satu dan dua ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan struktur jenjang persekolahan

bersama piramida tenaga kerja yang dipakai oleh banyak negara sebagai berikut:⁵



Bagan ini menunjukkan bahwa sekolah menengah umum (SMP, SMA) maupun sekolah menengah kejuruan dan teknologi menyiapkan anak didik untuk masuk ke lapangan kerja. Bagi lulusan sekolah menengah umum tetap terbuka peluang untuk langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Faktor ini mendorong masyarakat untuk lebih dahulu memilih sekolah menengah umum menjadi jalur pendidikan formal bagi anak-anaknya. Apalagi dalam kurikulum sekolah menengah umum tahun 1984 yang menerapkan sistem se-

⁵Hadiwaratama, "Pendidikan Kejuruan untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Nasional," *Analisis Pendidikan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun I, No. 2, 1980, hal. 64.

mester, anak didik mulai dari semester tiga memilih paket pelajaran A atau B. Mereka yang memilih paket B secara sadar menyiapkan diri untuk masuk ke lapangan kerja. Dan jalur pendidikan formal tinggi yang dapat ditempuhnya adalah politeknik. Oleh karena itu bagi siswa yang mengambil program pelajaran paket B pembinaan keterampilan dan sikap khusus yang sesuai dengan sifat spesialisasi kejuruan akan sama dengan siswa tamatan sekolah kejuruan dan teknologi.

Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga masyarakat dapat secara tepat memilih jalur pendidikan formal tingkat menengah bagi anak-anaknya. Apabila pemerintah masih berikhtiar untuk mengembangkan sekolah kejuruan dan teknologi, maka hal itu perlu terwujud dalam kebijaksanaan yang pasti tentang tujuan sekolah kejuruan yang berbeda dengan tujuan sekolah menengah umum.

Apabila masyarakat telah mengetahui tujuan sekolah menengah kejuruan dan teknologi secara tepat, maka minat mereka untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah ini dapat dirangsang, misalnya dengan memberikan beasiswa bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan dan teknologi tertentu, seperti SPG dan SGO. Hal ini mengingat kebutuhan tenaga guru setiap tahunnya akan terus meningkat di satu pihak, sedangkan di pihak lain minat para orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke SPG atau sekolah pendidikan guru pada umumnya sangat kecil. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyalurkan tenaga kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan/mebutuhkannya perlu memberi peluang yang lebih besar kepada pencari kerja yang memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Tentu hal ini perlu disesuaikan dengan persyaratan dari pihak pemakai tenaga kerja.

BIAYA

Biaya untuk mendirikan sebuah sekolah menengah kejuruan dan teknologi adalah lebih besar daripada biaya untuk mendirikan sebuah sekolah menengah umum. Sebuah sekolah menengah kejuruan dan teknologi membutuhkan laboratorium, bengkel kerja, mesin-mesin dan peralatan untuk karya praktek, dan perpustakaan.

Apabila semua ini tersedia dan dilengkapi lagi dengan tenaga guru bidang studi yang bermutu dan memiliki semangat mengabdikan pada profesinya, maka para lulusan dari sekolah ini pasti bermutu pula. Dewasa ini masyarakat pemakai tenaga kerja sering mengeluh bahwa banyak lulusan sekolah menengah

kejuruan dan teknologi tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk memenuhi tuntutan jenis pekerjaan yang ada. Timbul ungkapan-ungkapan sinis dalam masyarakat terhadap sekolah menengah kejuruan dan teknologi, seperti "STM Sastra" dan lain sebagainya.

Biaya yang besar ini tidak hanya digunakan untuk mendirikan gedung dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan, tetapi juga untuk memelihara dan memperbaiki peralatan yang rusak. Banyak peralatan praktek di sekolah menengah kejuruan dan teknologi tidak dapat dipakai karena rusak, dan bahkan sering menjadi "besi tua" karena tidak diperbaiki. Akibatnya jam pelajaran praktek diisi dengan kegiatan melihat dan meraba-raba peralatan yang rusak itu, jika tidak dengan pelajaran teori.

Kadaan seperti ini tidak jarang disebabkan oleh tidak tersedia dana yang memadai. Oleh karena itu sebagai pengelola dan penanggung jawab terhadap sekolah-sekolah negeri menengah kejuruan dan teknologi pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menggunakan dana yang terbatas secara efektif, efisien dan tepat guna. Dewasa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Departemen Agama merencanakan untuk membangun rumah/tempat ibadah di setiap sekolah negeri. Apakah hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak? Apakah tidak lebih bijaksana dana untuk kepentingan itu digunakan untuk mengadakan atau memperbaiki peralatan praktek, sarana dan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan dan teknologi?

Untuk mengatasi kekurangan dana, pemerintah dapat juga mendorong pihak swasta yang mampu dan mau memberikan bantuan (donatur) ataupun mendirikan sekolah kejuruan dan teknologi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kelompok-kelompok industri, pengusaha-pengusaha sebagai pemakai tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan dan teknologi perlu didorong untuk menjadi donatur atau menyediakan di lingkungan usahanya peralatan-peralatan yang dapat dipakai oleh para siswa untuk praktek.

Memang sudah waktunya pimpinan sekolah menengah kejuruan mengadakan hubungan/kerjasama dengan kelompok industri, pengusaha, BUMN. Secara demikian sebagai penghasil tenaga kerja sekolah dapat mengetahui secara langsung jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Di samping itu dunia usaha perlu melaksanakan "in service training" bagi tenaga kerja yang baru diterimanya. Departemen Tenaga Kerja secara teratur melatih tamatan SMTA umum atau kejuruan dan teknologi di Balai Latihan Keterampilan. Rupanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjalin hubungan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja untuk merumuskan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini.

PENUTUP

Pengembangan sekolah menengah kejuruan dan teknologi sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional dalam Pelita IV ini diarahkan pada usaha penyesuaian berbagai macam kesempatan kerja di sektor-sektor yang memerlukan keahlian/keterampilan dengan peningkatan mutu dan intensitas keterampilan tenaga kerja tingkat menengah. Ini berarti bahwa lingkungan sekolah menengah kejuruan dan teknologi sebagai wadah yang menghasilkan tenaga kerja jenis ini perlu ditata secara mendasar. Penataan ini dapat dimulai dengan mengadakan gedung/ruang kelas, laboratorium, bengkel-bengkel kerja, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, kurikulum dan silabus, sehingga jelas perbedaannya dengan sekolah menengah umum, terutama dalam hal tujuan dan orientasinya, dan pembinaan guru bidang studi yang bermutu. Semua ini membutuhkan jumlah dana yang besar. Oleh karena itu sebagai penanggung jawab utama pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan dan teknologi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menggunakan dana yang terbatas itu untuk keperluan yang mendesak, seperti membina sekolah kejuruan dan teknologi ini.